

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No.3 Tahun 2014, TLN No.5491.

Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No.3 Tahun 2014, TLN No.5491.

Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. PP No. 37 Tahun 1998. LN Nomor 52 Tahun 1998 Nomor 52, TLN No. 3746.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, LN Nomor 59 Tahun 1997; TLN No. 3696.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, LN Tahun 2016 Nomor 120; TLN No. 5893.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, LN Tahun 2021 Nomor 22; TLN No. 6624.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah, LN Tahun 2016 Nomor 230; TLN Nomor 5943, Pasal 1 angka 4

Peraturan Menteri Agrarian/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Th1997 tentang Pendaftaran Tanah, BNRI No. 722.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, BNRI Tahun 2021 No. 211.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, BNRI Tahun 2016 No. 2128.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2018, BNRI Tahun 2018 No. 395.

Peraturan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah.

B. PERATURAN

Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.

C. BUKU

A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1999.

Kapita Selektta Notaris-PPAT, Bandung: Pengurus Daerah Kabupaten Bandung Ikatan Notaris Indonesia, 2016.

Al Rashid, Harun, Sekilas Tentang Jual Beli Tanah, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Amrizakar, Tabir Kesaktian Akta Notaris. Depok: Khalifah Mediatama, 2020.

Andasasmita, Komar. Notaris I, Bandung: Sumur Bandung, 1981.

Cahyono, Akhmad Budi., & Surini A. S., Mengenal Hukum Perdata, Depok: CV Gitama Jaya, 2008.

Fadli, Zul. Hukum Akta Notaris, Jambi: Lingkar Kenotariatan, 2020.

Fuady, M. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2017.

G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Ketiga, Jakarta: Erlangga, 1992.

Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya, Jakarta: DJambatan, 2008.

HS. Salim. Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Peraturan Jabatan dan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

- Kie, Tan Thong, Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Mamudji, Sri. et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Miru, A., & Pati, S. Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Dengan 1456 Bw. PT Rajagrafindo Persada, 2008
- Muhammad, A. Etika Profesi Hukum. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. Perikatan yang lahir dari perjanjian. PT. Grafindo Persada, 2008
- Perangin, Effendi, Mencegah Sengketa Tanah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Praktek Jual Beli Tanah, Jakarta: Rajawali Pers, 1987
- Santoso, U. Hukum Perumahan. Surabaya: Kencana, 2014
- Setiawan, R. Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum. Bina Cipta, 1991.
- Setyo, Wicaksono Frans, Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa, Jakarta: Visimedia, 2009.
- Soedjendro, J. Kartini, Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Depok: UI Press, 2007.
- Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Depok: Raja Grafindo, 2019.
- Soerodjo, I. Kepastian hukum pendaftaran hak atas tanah di Indonesia. Arkola, 2002.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2014.
- Aneka Perjanjian, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Subekti, R. & T. Tjtrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Utomo, H. I. W, Memahami peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah. Surabaya: Kencana, 2002.

D. JURNAL

- Agustina, Rosa. "Perbuatan Melawan Hukum", Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta 2003. hal. 117.
- Budiono, Herlien. "Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Mutlak", Majalah Renvooi, No. 10, Th. I (Maret 2004). Hal. 57.
- Danastri, Avitya, Pieter Latumeten, Widodo Suryandono, "Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual yang Mengandung Cacat Hukum". Indonesian Notary, Vol. 2, No. 4 (2020), hal. 95.
- Nurkasanah, Ida. "Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Otentik yang Dibuat Dihadapannya", (April 2015). Hal. 4.
- Rafiq Adi Wardana, I Gusti Ayu Ketut, "Pembatalan Akta Jual Beli PPAT Yang Cacat Hukum dengan Putusan Pengadilan", Jurnal Ilmu Hukum Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret. hal. 5-6.
- Sari, Masnah, 2002, "Kewajiban PPAT Untuk Merahasiakan Isi Akta-akta Dalam kaitannya Dengan Hak Ingkar Yang Diberikan oleh Undang-undang Guna Melindungi Kepentingan Masyarakat Umum". Depok, (Edisi: 7 September). Hal. 5.
- Tamara, Vicky. "Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Kuasa Mutlak pada Akta Kuasa Menjual", Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Indonesia: Depok, 2016. hal. 27-29.
- Wijaya, Luisiana Iskandar, Arsin Lukman, Suparjo Sujadi, "Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kaitannya dengan Pembuatan Akta Jual Beli yang Memfasilitasi Jual Beli Tanah Melanggar Hukum", Indonesian Notary, hal. 292-297.

E. INTERNET

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548f3f2f8a900/pengikatan-jual-beli-dan-kuasa-untuk-menjual/>, diakses pada 12 April 2022

<https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51466c18c9a9f/kedudukan-istri-dalam-melakukan-perbuatan-hukum/> diakses pada 21 Mei 2022.

Kedudukan Istri Dalam Melakukan Perbuatan Hukum, <https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51466c18c9a9f/kedudukan-istri-dalam-melakukan-perbuatan-hukum/> diakses pada 21 Mei 2022